

BAB IV

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) KOPERASI SYARIAH

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif. Pada penerapannya, akuntansi tidaklah mutlak melainkan dapat berubah-ubah. Hal ini dikarenakan penerapan akuntansi di setiap entitas berbeda-beda. Namun setiap kesatuan usaha mempunyai kewajiban dan keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam mengelola transaksi keuangan. Oleh sebab itu, setiap laporan yang dihasilkan harus mengacu kepada PSAK.²⁵

Sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi yang menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk koperasi adalah SAK ETAP. Sehingga peraturan ini juga berlaku untuk setiap koperasi termasuk juga koperasi syariah. Akan tetapi terdapat permasalahan pada Paragraf 1 dalam PSAK Syariah 101 menyebutkan bahwa jika suatu lembaga keuangan syariah merupakan entitas syariah maka standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi adalah PSAK Syariah.

Oleh karena itu koperasi syariah menggunakan gabungan antara SAK ETAP dan juga SAK syariah dengan ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi koperasi syariah tetap mengacu pada SAK ETAP, sementara PSAK Syariah hanya berfungsi sebagai pedoman bagi transaksi-transaksi yang tidak diatur dalam SAK ETAP, sehingga laporan keuangan yang disusun oleh koperasi syariah yaitu laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan modal, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, catatan atas laporan keuangan, laporan sumber dan

²⁵ Sofyan Syafri Harahap, *"Teori Akuntansi"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 4

penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

A. PSAK Syariah

Untuk menjaga kesesuaian akuntansi syariah pada entitas syariah maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai Badan Penyusun Standar Akuntansi Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 59 pada tahun 2007. PSAK ini hanya berlaku untuk perbankan syariah sehingga pada tahun 2008 DSAK membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang bertugas untuk melakukan perubahan PSAK 59 untuk disempurnakan menjadi PSAK syariah.

Isi PSAK Syariah terdiri dari: PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*, PSAK 103 tentang akuntansi *salam*, PSAK 104 tentang akuntansi *istishna'*, PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, PSAK 106 tentang akuntansi *musyarakah*, PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*, PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah, PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, *shadaqah*,²⁶ Konsep laporan keuangan koperasi syariah berlandaskan PSAK 100-101. PSAK 100 berisi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) sedangkan PSAK 101 berisi penyajian laporan keuangan syariah

Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK 101)

PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah Penyajian laporan keuangan untuk koperasi syariah mengacu pada SAK Syariah sebagai berikut

1. Neraca, laporan keuangan yang menggambarkan tentang kondisi keuangan pada suatu periode.

Komponen neraca adalah :

²⁶ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia ,2011)
hlm 18-19

- a. Aset, yaitu kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operational usaha. Aset juga merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi. Aset dapat diperoleh dari sumbangan, yang tidak terikat penggunaannya, diakui sebagai aset tetap. aset adalah aset lancar dan aset tidak lancar. Ada beberapa akun yang khusus di koperasi syariah misalnya piutang murabah, piutang musyarakah, piutang *salam* dan lainnya
 - b. Kewajiban, merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh koperasi di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa, yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Kewajiban juga merupakan tanggungjawab koperasi saat ini, yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya ekonomi. Komponen Kewajiban adalah kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - c. Ekuitas, adalah modal yang mempunyai ciri : berasal dari anggota dan atau dari sumber lain dalam koperasi, seperti cadangan, SHU tahun berjalan, dan dari luar koperasi seperti hibah. Komponen ekuitas adalah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Hibah atau Modal Sumbangan, SHU tahun berjalan dan Cadangan.
2. Perhitungan Hasil Usaha Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi. Komponen Perhitungan Hasil Usaha adalah Pelayanan anggota, Pendapatan dari non anggota, Sisa Hasil Usaha Kotor, Beban Operasional, Pendapatan dan atau beban lainnya, Beban pajak, Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak.
 3. Laporan Perubahan Ekuitas (Modal)
Laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan laba atau rugi koperasi untuk satu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode

tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, SHU yang tidak dibagikan, pada periode akuntansi.

4. Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyediakan informasi tentang uang tunai dan setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen terpisah. Arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar uang tunai atau setara tunai. Komponen Arus kas adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
5. Lap Sumber & Penggunaan Dana Zakat Laporan ini untuk menjelaskan sumber penerimaan dan penggunaan dari dana zakat selama satu periode.
6. Lap Sumber dan Penggunaan Dana *Qard* Laporan ini untuk menjelaskan sumber penerimaan dan penggunaan dari dana *qordul Hasan* (dana kebajikan) dalam periode tertentu.
7. Catatan atas Laporan Keuangan ini menjelaskan beberapa kebijakan akuntansi yang dipakai diperusahaan misalnya kebijakan penyusutan, kebijakan dana kas kecil, kebijakan metode penghitungan persediaan dan pengungkapan lain
8. Laporan promosi ekonomi Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Tidak semua koperasi menggunakan laporan promosi ekonomi anggota.

Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu :

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
- b. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
- c. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha

Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. Secara ringkas kita bisa memahami bagaimana laporan promosi ekonomi bisa menunjukkan bagaimana

koperasi ikut mensejahterakan anggota, dalam satu periode berjalan maka koperasi akan melakukan berbagai transaksi yang pada akhir periode akan diketahui berapa keuntungan dari usaha tersebut, selain itu juga akan bisa diketahui transaksi yang berasal dari anggota, dari dua unsur tersebut maka akan bisa difahami berapa manfaat yang bisa diperoleh dari anggota, keuntungan dari koperasi akan dibagikan kepada anggota secara maksimal dan pembagiannya berdasarkan berapa besar transaksi anggota terhadap anggota dan juga berapa besarnya ekuitas yang dimiliki oleh anggota. Berdasarkan hitungan tersebut maka akan bisa difahami berapa besar anggota memperoleh kemanfaatan dari koperasi, yang akan dinikmati/diperoleh dari anggota adalah sebanding dengan pengorbanan yang mereka berikan kepada anggota, apabila hal tersebut bisa diwujudkan maka ciri khusus koperasi yaitu dari anggota untuk anggota sampai anggota bisa diwujudkan.

B. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2009 oleh IAI. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Jenis usaha yang tergolong dalam entitas tanpa akuntabilitas publik banyak terdapat di Indonesia mulai dari usaha kecil dan menengah termasuk juga badan usaha koperasi. Pada penelitian ini difokuskan pada koperasi, karena koperasi memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional, seperti pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan

masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian, dan menciptakan pasar baru.²⁷

Laporan Keuangan SAK ETAP :

a. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu atau akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos : kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban kewajiban diestimasi, ekuitas. Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP menyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos : pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi neto. Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Selain itu entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos dalam catatan atas laporan keuangan.

²⁷ Boy Zulkifli Syamsul Bakhri, Rahmawati, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bmt Al-Ittihad Pekanbaru", A-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan Vol. 16 No. 1, 2019

- c. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba.²⁸
- 1) Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain ke pengusaha ekuitas selama periode tersebut.
 - 2) Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Entitas menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran deviden, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi.
- d. Laporan Arus Kas Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
- 1) Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode

²⁸ Testru Hendra, "PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM DENGAN PENGEMBANGAN KOPERASI SYARI'AH", Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)-Volume 1, No. 1, 2016

ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

- 2) Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi dan Pendanaan Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pospos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.